

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN NEGERI LEMBATA
KELAS II**



PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II
Jalan. Trans Atadei, Lewoleba, Kabupaten Lembata - NTT
Telp/Fax. (0383) 2343010
email : pn_lbt@yahoo.co.id
website : pn-lembata.go.id



PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

NOMOR : 3 /SKKPN.W26-U13/OT01.6/I/2024

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Negeri Lembata Kelas II perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

: SK Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Nomor 245 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

: Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Lembata Kelas II tanggal 23 Januari 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Lembata Kelas II.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI LEMBATA KELAS II

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Lembata Kelas II, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Lembata Kelas II agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lembata, 23 Januari 2024
Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.
NIP. 198011302003121001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI LEMBATA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} = 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} = 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p style="text-align: center;"> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} = 90\%$ </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 		
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dari upaya hukum banding dan kasasi • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 			
	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	

	Diversi	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 		
	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p style="text-align: right;">85%</p> <p>Catatan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>Jumlah Salinan Putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Catatan : Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang di minutati dan dikirim tepat waktu _____</p> <p>Jumlah Putusan Perkara Pidana _____</p> <p>100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Pengadilan Tk.Pertama disampaikan kepada para pihak - Jumlah Putusan adalah perkara minutati yang sudah diputus dan dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutati dan Pemberkasan Perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil _____</p> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi _____</p> <p>5%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	<p>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan _____</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo _____</p> <p>0%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan _____</p> <p>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan _____</p> <p>0%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Pengadilan	Catatan : •		
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) _____</p> <p>Jumlah Permohonan Layanan Hukum _____</p> <p>100%</p> <p>Catatan : •</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah Eksekusi Perkara Perdata yang telah selesai dilaksanakan _____</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata _____</p> <p>80%</p> <p>Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan	Jumlah Pengawasan Biaya Perkara	<p>Jumlah Biaya Perkara yang telah selesai dilaksanakan _____</p> <p>Jumlah Biaya Perkara _____</p> <p>80%</p> <p>Catatan : •</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Pengawasan Keuangan DIPA	<p>Jumlah Anggaran yang telah selesai dilaksanakan _____</p> <p>Jumlah Anggaran _____</p> <p>80%</p> <p>Catatan : •</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Jumlah Pengawasan Administrasi Umum	<p>Jumlah Administrasi Umum yang telah selesai dilaksanakan _____</p> <p>Jumlah Administrasi Umum _____</p> <p>80%</p> <p>Catatan : •</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya	Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi umum	<p>Jumlah SDM yang telah selesai mengikuti diklat administrasi umum _____</p> <p>Jumlah SDM Administrasi _____</p> <p>80%</p> <p>Catatan : •</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Manusia	Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM yang telah selesai mengikuti diklat administrasi teknis 	80%	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah SDM Teknis 		



Lembata, 23 Januari 2024
Ketua Pengadalan Negeri Lembata Kelas II,

PERELA DE ESPERANZA, S.H.
NIP. 198011302003121001